

**PERBANDINGAN PENAFSIRAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE YANG
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DARI KEPOLISIAN RI DENGAN PENUNTUT
UMUM DARI KEJAKSAAN RI**

Deni Pardiana

Abstrak

Restoratif justice merupakan sebuah alternatif yang berfungsi untuk memberikan ruang diskusi masyarakat untuk membina hubungan baik dan menyelesaikan masalah dengan lebih bijak. Dalam implementasi restorative justice di Indonesia, belum memiliki dasar hukum yang jelas, sejauh ini Lembaga hukum melaksanakan restorative justice berdasarkan aturan yang ada pada instansi masing-masing. Kepolisian dan kejaksaan merupakan dua Lembaga hukum yang keduanya memiliki kewenangan masing-masing dalam penegakan hukum dan memiliki dasar hukum yang kuat. Sebagai pengendali kebijakan dan sesuai asas dominus litis kejaksaan memiliki peran untuk menerapkan keadilan restorative justice, dan dalam UU no. 2 Tahun 2002 Kepolisian juga merumuskan norma baru dalam penegakan hukum restorative justice. Hal ini yang mencoba. Dalam penyelidikan sebuah kasus keduanya sama-sama memiliki wewenang, hal ini yang perlu ditegakkan Kembali wewenang penyelidikan dan penyidikan oleh kedua Lembaga dan kontribusinya dalam sebuah penyelesaian kasus. Dalam tulisan ini mencoba untuk menganalisis dan membahas bagaimana implementasi restorative justice kedua Lembaga serta kewenangan dan aturan kedua Lembaga ini melalui studi Pustaka dan kebijakan.

Kata kunci: Restoratif Justice, Kepolisian, Kejaksaan

COMPARISON OF THE INTERPRETATION OF THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE CONDUCTED BY INVESTIGATORS FROM THE RI POLICE AND THE PUBLIC PROSECUTION FROM THE AGO OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Deni Pardiana

Abstract

Restorative justice is an alternative that functions to provide space for community discussion to foster good relations and solve problems more wisely. In the implementation of restorative justice in Indonesia, it does not yet have a clear legal basis, so far legal institutions carry out restorative justice based on existing rules in their respective agencies. The police and the prosecutor's office are two legal institutions which both have their respective authorities in law enforcement and have a strong legal basis. As a policy controller and in accordance with the principle of dominus litis merit has a role to implement restorative justice, and in Law no. 2 of 2002 Polri also formulated new norms in upholding restorative justice law. This is what tried. In investigating a case, both institutions have the same authority, this is what needs to be enforced. Investigations and investigations are carried out by the two institutions and their contributions in a case settlement. This paper tries to analyze and discuss how the implementation of restorative justice for the two institutions as well as the authorities and rules of the two institutions through literature and policy studies

Keywords: : Restorative justice, police, prosecutors